

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan studi yang sangat fleksibel dan menjadi komponen penting dalam kehidupan sosial. Ini karena komunikasi adalah aktivitas yang terjadi setiap hari, baik secara verbal maupun non-verbal. Seperti yang dijelaskan oleh Koesoemowidjojo (2021), komunikasi adalah proses interaksi untuk pertukaran informasi dengan tujuan mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Salah satu contoh penerapan ilmu komunikasi adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai komunikasi etis yang efektif. Komunikasi etis yang efektif adalah komunikasi yang dibangun oleh individu, lembaga, atau institusi untuk menciptakan pemahaman atas makna informasi. Artinya, informasi yang disampaikan oleh komunikator harus benar dan dapat dipahami oleh penerima pesan.

Dalam konteks penggunaan dana desa yang transparan, komunikasi berfungsi untuk menjelaskan semua aspek terkait pengeluaran dana tersebut, dengan tujuan membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada prinsipnya, transparansi dalam lingkup pemerintahan harus menjadi fokus utama, karena hal ini mengukur sejauh mana aparat pemerintah

bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Transparansi informasi adalah salah satu hasil dari demokratisasi komunikasi pasca reformasi politik tahun 1998 (Susanto, Eko Harry: 2017).

Dilihat dari perspektif ilmu komunikasi, pemerintah dapat mencapai transparansi melalui berbagai cara, seperti menggunakan model komunikasi linier, transaksional, dan interaksi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi juga membantu pemerintah dalam mencapai transparansi, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan situs web untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat serta melibatkan mereka dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam ekonomi, sumber daya manusia, dan pemenuhan kebutuhan pokok nasional. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ini adalah program bantuan dana desa, yang dimulai pada tahun 2015 dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, dana yang

dialokasikan untuk program ini mencapai Rp. 70 triliun dalam RAPBN. Namun, kurangnya komunikasi interaktif oleh aparat pemerintah desa membuat program ini rentan terhadap kasus korupsi. Pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi di sektor dana desa, dan jumlahnya meningkat menjadi 155 kasus pada tahun 2022 (dataindonesia.id, 2023), yang tentunya hal ini merugikan keuangan negara.

Desa Sako sendiri telah menerima bantuan dari pemerintah sejak awal program ini dimulai. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan administrasi pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelatihan aparat pemerintah, dan mendukung kegiatan positif bagi pemuda/i. Pada tahun 2023, Desa Sako menerima bantuan sebesar Rp. 1 miliar, jumlah yang signifikan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, penulis berencana untuk melakukan penelitian tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sako belum maksimal dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sako tidak efektif sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan dana desa.
3. Kurangnya pemanfaatan internet seperti situs web, dan media sosial untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sako.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu; **Bagaimana komunikasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui seberapa maksimal pemerintah Desa Sako dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh Desa Sako, kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan internet sebagai media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sako untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan dana desa.